



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

LAPORAN HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TAHUN 2025



**Jl. Jenderal Sudirman 02, RT.04,
Kelurahan Melayu- Tenggarong**



dp2kbbkabkukar@gmail.com



<https://dp2kb.kukarkab.go.id>



Dppkb Kutai Kartanegara



dppkb_kutai_kartanegara



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA

Jln. Jendral Sudirman Nomor 02 Website: <https://dp2kb.kukarkab.go.id>
E-mail: dp2kbkukakar@gmail.com Kode Pos 75512

Tenggarong, 29 Mei 2025

Nomor : 204 /DPPKB/Sekre-Keu/500.2.3.14/07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Hasil Penilaian Mandiri Maturitas
Penyelenggaraan SPIP Tahun
2025.-

Kepada
Yth. Bupati Kutai Kartanegara
di --
Tenggarong

Dengan ini, kami sampaikan Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Tahun Periode penilaian 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025 pada **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** dengan uraian sebagai berikut:

A. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan hasil

Pelaksanaan Penilaian Mandiri (PM) SPIP Terintegrasi Tahun 2025 pada **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level “terdefinisi” pada tingkat level 4 (Empat) dari 5 (lima) tingkatan maturitas SPIP yakni “rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola dan terukur/optimum. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut:

NO	Kompetensi Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	Optimum	5
2.	Struktur dan Proses	Terdefinisi	1,050
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	Optimum	1.020
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Terdefinisi	4,070
	- MRI	Terkelola dan Terukur	4,133
	- IEPK	Terdefinisi	3,402

Dengan tingkat maturitas “rintisan/berkembang/terdefinisi/terkelola

dan terukur/optimum”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** (terdefinisi)

- 1) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya termasuk strategi pencapaian kinerja dan pengendaliannya;
- 2) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik, namun strategi pencapaian kinerjanya masih belum relevan, serta pelaksanaan pengendalian masih sebatas pemenuhan;
- 3) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;
- 4) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, namun belum adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi;
- 5) Telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Sehingga **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** telah berada pada level 4 (terdefinisi).

2. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat terdefinisi: adalah perlu melakukan integrasi dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat dan mengintegrasikan dengan kegiatan lainnya.

B. URAIAN PENILAIAN

1. Dasar Penilaian

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah, di mana Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 3) Surat Tugas/Surat Keputusan Kepala **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Nomor: 21/DPPKB/SEK/100.1.2/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 tentang Tim Pelaksana Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP)di lingkungan **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Tujuan Penilaian

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan:

- 1) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 2) Memberikan saran perbaikan (area of Improvemen) maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** meliputi komponen sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- 2) Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
- 3) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) sub unsur penilaian;
- 4) Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi seluruh sasaran strategis dan sasaran operasional program, kegiatan dan sub kegiatan.
- 5) Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025

4. Pelaksana Penilaian

Sesuai dengan Surat Tugas/Surat **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Nomor: 21/DPPKB/SEK/100.1.2/1/2025 tanggal 13 Januari 2025 Pelaksana Penilaian (Assesor) Penilaian Mandiri Perangkat Daerah:

- | | | | |
|----|---------|--|-----------|
| 1. | Nama | : Surya Admaja, SP | Assesor 1 |
| | NIP | : 19700402 199912 1 002 | |
| | Jabatan | : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk | |
| 2. | Nama | : Hj. Rina Luthfiana, MM | Assesor 2 |
| | NIP | : 19680721 199503 2 005 | |
| | Jabatan | : Kepala Bidang Keluarga Berencana | |
| 3. | Nama | : Sri Lindawati, S.Sos, M.Kes | Assesor 3 |
| | NIP | : 19711213 199102 2 001 | |
| | Jabatan | : Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | |
| 4. | Nama | : Hj. Bertha Melania, SE.,M.Si | Assesor 4 |
| | NIP | : 19730406 199803 2 009 | |
| | Jabatan | : Kepala Su Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian | |

5. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kutai Kartanegara dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu:

No	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
1.	Penetapan Tujuan	2	40%
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
2.	Struktur dan Proses	25	30%
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	7	30%
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan	1	
Total Bobot			100%

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan sub unsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kutai Kartanegara. Data dan kertas kerja dan data dukung dihimpun dalam media google drive <https://cloud.kukarkab.go.id>

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1.0 \leq \text{Nilai} < 2.0$
Berkembang	2	$2.0 \leq \text{Nilai} < 3.0$
Terdefinisi	3	$3.0 \leq \text{Nilai} < 4.0$
Terkelola dan Terukur	4	$4.0 \leq \text{Nilai} < 4.5$
Optimum	5	≥ 4.5

6. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024-2025, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kutai Kartanegara telah memenuhi kriteria pada tingkat “terdefinisi” dengan skor sebesar 4,000, dengan rincian sebagai berikut:

**PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Periode Penilaian 01 Juli 2024-1 sampai dengan 30 Juni 2025**

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis	5,000	50,00%		2,500		
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%		5,000		
PENETAPAN TUJUAN			40,00%		2,000	
STRUKTUR DAN PROSES						
Lingkungan Pengendalian						
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)	3,063	3,75%		0,115		
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)	4,000	3,75%		0,150		
Kepemimpinan yang Kondusif (1.3)	3,518	3,75%		0,132		
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)	3,000	3,75%		0,113		
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)	4,000	3,75%		0,150		
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM (1.6)	3,000	3,75%		0,113		
Perwujudan Peran APIP yang Efektif (1.7)	4,000	3,75%		0,150		
Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)	3,500	3,75%		0,131		
Penilaian Risiko						
Identifikasi Risiko (2.1)	3,333	10,00%		0,333		
Analisis Risiko (2.2)	3,000	10,00%		0,300		
Kegiatan Pengendalian						
Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah (3.1)	4,000	2,27%		0,091		
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)	3,000	2,27%		0,068		
Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)	4,000	2,27%		0,091		
Pengendalian Fisik atas Aset (3.4)	4,000	2,27%		0,091		
Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)	4,000	2,27%		0,091		
Pemisahan Fungsi (3.6)	4,000	2,27%		0,091		
Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting (3.7)	4,000	2,27%		0,091		
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian (3.8)	4,000	2,27%		0,091		
Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)	4,000	2,27%		0,091		
Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)	4,000	2,27%		0,091		
Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)	4,000	2,27%		0,091		
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)	3,238	5,00%		0,162		
Komunikasi yang Efektif (4.2)	3,000	5,00%		0,150		
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)	4,000	7,50%		0,300		
Evaluasi Terpisah (5.2)	3,000	7,50%		0,225		
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES				3,500		
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%		1,050	
PENCAPAIAN TUJUAN SPIP						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian <i>Outcome</i>	5,000	20,00%		1,000		
Capaian <i>Output</i>	3,000	10,00%		0,300		
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK	3	25,00%		0,750		
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset	3	25,00%		0,750		
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK	3	20,00%		0,600		
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%		3,400		
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%		1,020	
NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP						4,070

NILAI INDEKS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO (MRI)

4,113

AREA/KOMPONEN	BOBOT	SKOR	NILAI
PERENCANAAN	40,00%		2,000
KUALITAS PERENCANAAN	40,00%	5,000	2,000
KAPABILITAS	30,00%		0,988
KEPEMIMPINAN	5,00%	3,250	0,163
KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO	5,00%	4,000	0,200
SUMBER DAYA MANUSIA	5,00%	3,000	0,150
KEMITRAAN	2,50%	3,000	0,075
PROSES MANAJEMEN RISIKO	12,50%	3,200	0,400
HASIL	30,00%		1,125
AKTIVITAS PENANGANAN RISIKO	18,75%	3,000	0,563
OUTCOMES	11,25%	5,000	0,563
TOTAL	100,00%		4,113

NILAI INDEKS EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI (IEPK)

3,402

PILAR	BOBOT	SKOR	NILAI
KAPABILITAS PENGELOLAAN RISIKO KORUPSI	48,00%		1,752
KEBIJAKAN ANTIKORUPSI	9,60%	4,000	0,384
SEPERANGKAT SISTEM ANTIKORUPSI	7,20%	4,000	0,288
DUKUNGAN SUMBER DAYA	7,20%	3,000	0,216
POWER (KUASA & WEWEWANG)	14,40%	4,000	0,576
PEMBELAJARAN ANTIKORUPSI	9,60%	3,000	0,288
PENERAPAN STRATEGI PENCEGAHAN	36,00%		1,170
ASESMEN DAN MITIGASI RISIKO KORUPSI	9,00%	3,000	0,270
SALURAN PELAPORAN INTERNAL YANG EFEKTIF DAN KREDIBEL	3,60%	3,000	0,108
KEPEMIMPINAN ETIS	9,00%	4,000	0,360
INTEGRITAS ORGANISASIONAL	7,20%	3,000	0,216
IKLIM ETIS PRINSIP	7,20%	3,000	0,216
PENANGANAN KEJADIAN KORUPSI	16,00%		0,480
INVESTIGASI	8,00%	3,000	0,240
TINDAKAN KOREKTIF	8,00%	3,000	0,240
TOTAL	100,00%		3,402

KAPABILITAS APIP

4,000

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Tahun 1 Juli 2024 sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut

1. Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Penyelenggaraan SPIP mencapai nilai level 4,000 dengan karakteristik :

- “terdefinisi” adalah perlu melakukan integrasi dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat dan mengintegrasikan dengan kegiatan lainnya.

Untuk Maturitas Manajemen risiko mencapai nilai level 4,070 dengan karakteristik Risk Defined, yaitu MR diterapkan namun masih banyak kelemahan implementasi, pengendalian intern relatif baik.

- Risk Managed, yaitu Sudah ada MR, diimplementasikan dengan baik, masih ada kelemahan implementasi, pengendalian intern telah baik.

2. Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

a. Kualitas Sasaran Strategis

Nilai kualitas sasaran strategis, pada tingkat maturitas yang dicapai kualitas sasaran strategis dengan nilai :

- level 5 yaitu $\geq 90\%$ sasaran strategis Pemda dan OPD telah berorientasi hasil, relevan menggambarkan mandat, Indikator kinerja tepat, Indikator kinerja cukup untuk mengukur sasaran dan Target kinerja tepat

b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan

Nilai kualitas sasaran strategis, pada tingkat maturitas yang dicapai kualitas sasaran strategis dengan nilai :

- level 5 yaitu $\geq 90\%$ sasaran strategis Pemda dan OPD telah berorientasi hasil, relevan menggambarkan mandat, Indikator kinerja tepat, Indikator kinerja cukup untuk mengukur sasaran dan Target kinerja tepat.

3. Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut: 3=mengimplementasikan,

3.1 Lingkungan Pengendalian

3.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika

Penegakkan integritas dan nilai etika dalam melaksanakan tugas dan fungsi dengan telah mencapai level skor 3,063 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan/prosedur penegakan integritas dan Nilai Etika dan masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.1.2 Komitmen terhadap Kompetensi

Tugas dan jabatan dalam organisasi dilaksanakan dan diisi oleh SDM yang kompeten telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan standar kompetensi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, dan masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.1.3 Kepemimpinan yang Kondusif

Kepemimpinan yang kondusif telah mencapai level skor 3,518 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan yang menciptakan lingkungan yang kondusif, mengalokasikan sumberdaya dalam manajemen kinerja, mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan, menggunakan manajemen risiko sebaai indikator penilaian kinerja, dan masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.1.4 Struktur Organisasi Sesuai Kebutuhan

Struktur organisasi dibentuk dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi telah mencapai level skor 3,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan Struktur

organisasi, tugas dan fungsi sesuai proses bisnis organisasi dan didukung SDM yang mencukupi, dan masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.1.5 Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan fungsi telah memperhatikan benturan kepentingan telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan/prosedur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab, untuk dipahami dan dilaporkan hasil pelaksanaannya kepada pimpinan, dan masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM.

Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM telah mencapai level skor 3,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai, namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.1.7 Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Perwujudan peran APIP yang efektif telah mencapai level skor 4,000, dengan kondisi telah mengimplemetasikan pengawasan APIP guna memberikan nilai tambah pada perbaikan pengendalian organisasi namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait

Hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait pencegahan dan pengendalian kecurangan/Fraud dan mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko terkait kemitraan telah mencapai level skor 3,500, dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan/mekanisme hubungan kerja/tata kerja dengan instansi lain, dan menetapkan dan melakukan risiko terkait kemitraan, namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.2 Penilaian Risiko

3.2.1 Identifikasi Risiko

Identifikasi Risiko telah mencapai level skor 3,333 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan manajemen risiko dan telah menyusun *Risk Register* sesuai dengan proses bisnis operasional dan strategis organisasi namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.2.2 Analisis Risiko (2.2)

Analisis Risiko telah mencapai level skor 3,000. dengan kondisi telah mengimplemetasikan risiko yang telah dianalisis dampak dan tingkat keterjadian, prioritas risiko telah disusun dan telah ditetapkan rencana tindak pengendaliannya, pelaksanaan RTP risiko dan hasil telah berhasil menurunkan tingkat risiko termasuk risiko korupsi telah dimitigasi dan dipetakan, namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.3 Kegiatan Pengendalian

3.3.1 Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah

Pimpinan telah membandingkan tolok ukur kinerja dengan capaian kinerja secara berkala telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplementasikan pimpinan telah mereviu kinerja secara berjenjang kepada bawahan hingga staf, dilaksanakan secara berkala dalam rangka mengawal tujuan organisasi, namun masih terdapat kelemahan pada penrapannya.

3.3.2 Pembinaan Sumber Daya Manusia

Pembinaan SDM dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku telah mencapai grade level skor 3,000. dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan yang mengatur pembinaan SDM kepada pegawai, dilaksanakan secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan organisasi, namun masih terdapat kelmahan pada penerapannya.

3.3.3 Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi

Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan tidak terjadi telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan/grand design pengelolaan sistem informasi untuk memastikan tidak terjadinya kecurangan, namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.3.4 Pengendalian Fisik atas Aset

Pengelolaan barang milik daerah dilakukan untuk menjamin barang milik daerah digunakan sesuai peraturan yang berlaku (tidak terjadi pelanggaran hukum terkait penggunaan BMD) oleh pimpinan

dan pegawai) telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan Kebijakan/prosedur pengelolaan atas aset organisasi namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.3.5 Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja

Kegiatan pengendalian atas penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja dilakukan untuk menjamin keandalan ukuran dan ketepatan penetapan indikator masing-masing unit secara berjenjang dibandingkan dengan IKU organisasi telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplementasikan kebijakan/prosedur penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja, namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.3.6 Pemisahan Fungsi

Terdapat pemisahan fungsi sehingga seluruh aspek utama transaksi dan kejadian tidak dikendalikan hanya oleh satu orang telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan yang mengatur pemisahan fungsi dalam proses transaksi dan kejadian namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.3.7 Otorisasi atas Transaksi dan Kejadian yang Penting

Terdapat proses untuk memastikan transaksi dan kejadian penting hanya dapat diotorisasi ketika memenuhi persyaratan dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan yang mengatur

prosedur otorisasi atas transaksi dan kejadian namun masih terdapat kelemahan penerapannya

3.3.8 Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu atas Transaksi dan Kejadian

Terdapat proses untuk memastikan transaksi telah diklasifikasikan dengan layak dan dikelompokkan dengan benar serta dicatat dengan segera sehingga relevan, bernilai, dan berguna bagi manajemen telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan yang mengatur prosedur pencatatan atas transaksi dan kejadian namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.3.9 Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Pencatatannya

Terdapat pembatasan atas kesempatan dan hak untuk menggunakan, atau memperoleh sumber daya dan mengakses pencatatannya telah mencapai level skor 4,000. dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan yang mengatur prosedur pembatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi beserta pencatatannya namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.3.10 Akuntabilitas terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya

Terdapat pertanggungjawaban seseorang atau unit organisasi dalam mengelola sumber daya yang diberikan/dikuasakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan yang mengatur prosedur pertanggungjawaban sumber daya dan pencatatannya namun masih terdapat kelemahan

pada penerapannya.

3.3.11 Dokumentasi yang Baik atas SPI serta Transaksi dan Kejadian Penting

Terdapat pengelolaan, pemeliharaan, dan pendokumentasian secara berkala yang mencakup seluruh SPI serta transaksi dan kejadian penting yang dilaksanakan secara lengkap dan akurat untuk memfasilitasi penelusuran transaksi, kejadian, dan informasi terkait telah mencapai level skor 4,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan kebijakan yang mengatur prosedur pendokumentasian atas SPI serta transaksi dan kejadian penting, namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.4 Informasi dan Komunikasi

3.4.1 Informasi yang Relevan

Pengelolaan informasi yang relevan telah mencapai level skor 3,238 dengan kondisi telah mengimplemetasikan informasi yang relevan untuk mendukung pengendalian intern, telah membangun sistem pengaduan dan komunikasi kebijakan, risik register dan RTP risiko pada dokumen manajemen risiko serta saluran pelaporan internal namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.4.2 Komunikasi yang Efektif

Terlaksananya komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal dalam upaya pencegahan dan pengendalian kecurangan/fraud telah mencapai level skor 3,000 dengan kondisi telah mengimplemetasikan Komunikasi yang efektif kepada pihak internal dan eksternal organisasi

namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.5 Pemantauan

3.5.1 Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan telah mencapai skor **4,000** dengan kondisi telah mengimplemetasikan evaluasi pengendalian intern secara berkala terkait kinerja sasaran strategis, dan konerja operasional pada level program dan kegiatan kegiatan, dan individu, reviu proses manajemen risiko, pemantauan pelaksanaan manajemen risiko strategis dan operasional, namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

3.5.2 Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan telah reviu independen terhadap proses manajemen risiko telah mencapai level skor **3,000** dengan kondisi telah mengimplemetasikan pada seluruh aktivitas pengendalian intern dan pengendalian risiko oleh piak yang berkompeten dan metodologi yang tepat. Namun masih terdapat kelemahan pada penerapannya.

4. Penilaian Atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

4.1 Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

Capaian kinerja Outcome telah mencapai level skor 5,000 dengan capaian kinerja strategis pemerintah daerah yang diampu **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** sebesar 107%, rata-rata capaian sasaran outcome perangkat daerah 107% dan capaian output telah mencapai level skor 3,000 dengan kinerja rata-rata program dan kegiatan sebesar 95,5%.

4.2 Keandalan Pelaporan Keuangan

Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah mencapai level skor 5,000 dengan perolehan WTP selama 5 tahun berturut-turut.

4.3 Pengamanan atas Aset Negara

Catatan pengamanan aset telah mencapai level skor 3,000 yang didukung dengan SK Pengurus Barang, Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Kertas Kerja Rekonsiliasi Aset yang disampaikan ke BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.4 Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Ketaatan peraturan perundang-undangan dengan level 5,000 dan jumlah temuan BPK pada tahun 2024 sebanyak NIHIL temuan.

5. Rekomendasi Area Perbaikan (Area of Improvement).

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Rencana Aksi (*action Plan*) **Dinas**

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun 2024-2025 sebagai berikut:

- 5.1 meningkatkan/mempertahankan kualitas penetapan tujuan, dan pencapaian tujuan pada penyusunan perencanaan.
- 5.2 meningkatkan kualitas struktur dan proses, dengan melaksanakan diantaranya: (focus pada rencana aksi mengatasi pengendalian sub unsur yang masih lemah)
 - a. Pembinaan Kepegawaian
 - b. Koordinasi antara Petugas Lapangan dengan Kader

- 5.3 Meningkatkan Capaian Indikator Kinerja Utama Yaitu Menurunnya Angka Total Fertility Rate (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) dan Capaian Indikator kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian kami sampaikan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 untuk dapat diketahui, dan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Plt. Kepala,
Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana,

DAFIP HARYANTO, S.Sos.,M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP: 197009241990031001

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

Demikian kami sampaikan hasil penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 untuk dapat diketahui, dan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ketua Satgas SPIP/Sekretaris
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana

Dra. Mastukhah, M.Si

Nip: 19671112 199203 2 007

Tim Pelaksana Penilaian Mandiri

Surya Admaja, SP

NIP.19700402199912002

Sri Lindawati, S.Sos.,M.Kes

NIP.197112131991022001

Hennie Asfiyanie, SE.,M.Si

NIP. 196810131999032007

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah di Tenggarong di Tempat.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tempat

5.3 meningkatkan capaian indikator kinerja Utama Indeks Pembangunan Keluarga, Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dan Capaian Indikator kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Demikian kami sampaikan hasil penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 untuk dapat diketahui, dan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

**Plt. Kepala,
Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana,**



ARIANTO, S.Sos..M.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP: 19780502 200502 1 003

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong

- 5.3 Meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama Menurunnya Angka Total Fertility Rate (TFR) Per WUS (15-49 Tahun) dan Capaian Indikator kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian kami sampaikan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana** Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 untuk dapat diketahui, dan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Plt. Kepala,
Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana,



DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP: 197009241990031001

Tembusan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong